

ETIKA ISLAM TENTANG PEMBERITAAN POLITIK DI INDONESIA

Oleh: Joko Tri Haryanto
Balai Litbang Agama Semarang
E-mail : jejakagama@yahoo.co.id

Abstract

Life of the nation can not be separated from political events in which people participation are required. In determining political attitudes, people need information such as those obtained from political news. But in reform era, freedom of political news is highlighted in its ethical practices. As a Muslim majority country, Islamic ethics becomes an important source for political news in Indonesia. This study is conducted in philosophical method, by way of inventive and heuristic. This article expresses the ethics of political news in a review of Islamic ethics. In the level of text, ethics of reporting politics lays on mass media which should represent politics in its truth, at the level of discourse practice, responsibility and professional ethics are imperative categorical for the actors, at the level of sociocultural practice, the vision of media should be on a just and prosperous society.

Keywords: ethics, journalism, mass media, political news

I. Pendahuluan

Perintah membaca merupakan perintah Allah SWT yang paling awal bagi Nabi Muhammad SAW, “*Iqra’ bismi rabbika al-ladzi khalaq* (Bacalah dengan [menyebut] nama Tuhanmu yang menciptakan).” (QS. Al-Alaq : 1) yang berarti juga menjadi kewajiban bagi umat Islam. Perintah membaca ini tentu bermakna sangat luas, yang intinya adalah menyerap informasi. Perikehidupan, perilaku, sikap dan kecenderungan manusia pada akhirnya ditentukan oleh informasi yang sampai kepadanya. Penyebaran informasi ini tidak lepas dari peran pers, jurnalis dan media massa.

Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia adalah politik, oleh karena itu “membaca” politik menjadi penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan dan kewajiban politik dalam kehidupannya. Di antara sumber-

sumber yang memberi informasi tentang realitas politik adalah media massa melalui pemberitaan politik. Media massa dalam masyarakat dihadirkan oleh masyarakat sendiri untuk saling berbagi informasi, mengartikulasikan ide-ide, dan bahkan mencerminkan keadaan diri mereka sendiri termasuk dalam bidang politik.

Media massa memiliki fungsi strategis dalam memasok informasi politik bagi masyarakat. Dari berbagai aktivitas pers dan jurnalistik melalui media massa dirumuskan 4 fungsi dan tanggungjawab pers, yakni informasi, edukasi, intertainment dan kontrol sosial. Kontrol sosial dalam perspektif politik, dimaksudkan adalah untuk mengawasi perilaku sosial dan politik masyarakat terutama pihak kekuasaan (*watch dog*), Transparansi akuntabilitas publik bagi para pejabat dan media bagi pendapat rakyat. Itu sebabnya Pers termasuk salah satu dari 4 pilar demokrasi (*the fourth estate*): eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers (Muhtadi, 1999:48).

Namun media massa tidak tumbuh dari ruang kosong, melainkan hadir dalam konteks sosial, politik dan budaya masyarakatnya. Pada akhirnya media massa menjadi wadah pertarungan wacana politik melalui pemberitaan politiknya. Pemberitaan politik dipenuhi dengan tarikan-tarikan kepentingan dari berbagai pihak. Akhirnya malah muncul keluhan dari publik tentang media massa yang bertindak tidak obyektif, sepihak, mengingkari *cover both side*, menimbulkan bias, dan sebagainya sebagai mana yang ditetapkan dalam kode etika jurnalistik (Dharma,2003: iii).

Etika pemberitaan menjadi suatu hal yang urgen untuk diangkat kembali dalam situasi yang penuh nuansa politis seperti di tahun 2014 ini yang ditandai momentum pemilihan umum dan pemilihan presiden. Harapannya, media massa dalam situasi yang sedemikian ini adalah tetap berpegang pada kaidah-kaidah etika pemberitaan sehingga dapat menjalankan fungsi imperatifnya secara optimal, yakni untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh semua orang untuk menentukan sikap politiknya. Tinjauan etika religius dapat diterapkan dalam melihat penerapan etika pemberitaan oleh karena aspek religius menjadi sumber nilai dalam tradisi keagamaan yang dalam konteks masyarakat turut membangun dan menyumbangkan

nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat tersebut.

Persoalan media massa ini telah menarik minat para akademisi dan peneliti. Penelitian Mafri Amir tentang "Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam" (Amir, 1999) mengulas tentang komunikasi massa ditinjau dari sudut pandangan ajaran Islam. Pembahasannya dilakukan berdasarkan rujukan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang berhubungan dengan masalah-masalah komunikasi dan etikanya. Buku "Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, Sebuah Studi *Critical Discourse Analysis* Terhadap Berita-berita Politik" yang ditulis oleh Ibnu Hamad (Hamad, 2004) membedah konstruksi realitas politik yang dibangun oleh media massa, terutama dalam hal ini adalah wacana tentang parpol peserta pemilu. Musyafaq (2001) dalam penelitian tesisnya *Press Freedom in Indonesia an Axamination of "Pers Pancasila" Betwen 1993-1998*, menfokuskan pada kebebasan pers pada akhir era rezim Soeharto antara tahun 1993 dan 1998 melalui penelitian terbatas pada tulisan editorial dari lima surat kabat harian (Kompas, Suara Pembaharuan, Jawa Pos, Republika dan Media Indonesia). Najahan menunjukkan bahwa pers Indonesia pada akhir masa rezim orde baru tersebut adalah *Pseudo-Press Freedom*, bukan sebenar-benarnya kebebasan pers karena secara ketat dibatasi dan dikontrol oleh kekuasaan pemerintah.

Kajian yang dilakukan oleh Mafri Amir bersifat deduktif dengan mencari korelasi ideal etika komunikasi massa dengan etika dalam kitab suci al-Qur'an dan Hadits, sehingga belum menampilkan gambaran perilaku etis pelaku komunikasi massa sebagai suatu realitas. Sementara kebalikan dari itu, penelitian Ibnu Hamad secara induktif mampu mengungkap gejala riil konstruksi realitas media terhadap peristiwa politik, dan penelitian Najahan Musyafaq menggambarkan kondisi dari realitas kebebasan pers di akhir rezim Soeharto, namun keduanya sama sekali tidak menyinggung permasalahan etika, terlebih etika Islam.

Tulisan ini mencoba merefleksikan bagaimana etika pemberitaan politik di media massa menurut perspektif etika Islam. Hal ini penting guna memandu para pelaku media massa dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan kerangka etika, terutama etika Islam. Selain itu, tulisan ini juga penting

untuk meningkatkan daya kritis masyarakat dalam melakukan pembacaan media massa dalam rangka menuju masyarakat melek baca (*literate society*).

Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam ranah penelitian filsafat yaitu melakukan eksplisitasi tentang hakikat realitas yang ada dalam kehidupan manusia melalui kegiatan yang reflektif atau mencari pemahaman dalam kegiatan perenungan rasional dengan cara *inventif* dan bersifat *heuristis*. Cara *inventif* ini berupaya untuk mencari pemahaman baru terhadap modal pemikiran yang sudah ada, kemudian berupaya memberikan pemecahan bagi masalah-masalah yang belum diselesaikan. Sedangkan sifat *heuristis* atau *heuristika* adalah sifat yang mengaktualisasi pemikiran secara terus menerus, reflektif untuk membangun arus pemikiran yang dinamis dan kreatif. (Bakker, 1992 : 17) Pemberitaan politik sebagai wacana melibatkan tiga level struktur, dengan mendasarkan pada struktur wacana Norman Fairclough, yakni *teks*, *discourse practice*, dan *sociocultural practice* (Eriyanto, 2001 : 286). Analisis ini ditujukan pada tiga level tersebut. Kerangka analisis ini dipergunakan untuk melakukan refleksi dengan hampiran interpretasi (*hermeneutis*) untuk menafsirkan hubungan antara aktivitas pemberitaan politik dan konteks sosial politik dewasa ini dengan pemikiran etika Islam. Pada tahap ini, unsur metodis umum dalam penelitian filsafat seperti interpretasi, induksi-deduksi, koherensi, holistika, kesinambungan historis, idealisasi dan refleksi pribadi (Bakker, 1992 : 41) akan dipergunakan untuk mengelaborasi persoalan-persoalan pemberitaan politik dalam tinjauan etika Islam.

II. Pembahasan

1. Memahami Etika Islam

Kata etika, moral, dan akhlak sering dijumpai penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Istilah-istilah tersebut seringkali dianggap sama maknanya, sehingga kadangkala dipergunakan secara tumpang tindih dan rancu. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pada dasarnya istilah-istilah tersebut sama-sama berhubungan dengan perbuatan manusia dan penilaian atas perbuatan tersebut, yakni baik atau buruk. Namun sebenarnya istilah-istilah tersebut memiliki sisi pandang yang berbeda dalam melihat perbuatan manusia.

Menurut K. Bertens, etika berasal dari kata *ethos* dari bahasa Yunani yang artinya tempat tinggal yang biasa; adat istiadat; watak, sikap dan cara berfikir. Menurut pendapat para ahli bahasa Indonesia, istilah dengan akhiran -"ika" harus dipakai untuk menunjukkan ilmu, maka istilah etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. (Bertens, 2002 : 4) Atau menurut Franz Magnis Suseno, etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran, norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan pandangan moral secara kritis. (Suseno, 1993: 14)

Sedangkan moral berasal dari kata *mores* dalam bahasa Latin yang artinya sama dengan *ethos* dalam bahasa Yunani, yaitu adat istiadat, tingkah laku, kebiasaan. (Bertens, 2002 : 5) moral sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, yakni yang menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, atau menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungannya dengan orang lain. Pengertian moral ini mencakup cara bertingkah laku terhadap pihak lain dan norma yang mendasari cara berperilaku tersebut. Suatu perbuatan dipandang bermoral apabila sesuai dengan kebiasaan atau adat istiadat tertentu, yang tentu saja proses menjadi kebiasaan dan menjadi adat istiadat karena perbuatan tersebut dinilai baik dan berguna oleh suatu masyarakat. Kebalikan dari itu, perbuatan yang melanggar kebiasaan atau adat istiadat akan dinilai sebagai perbuatan yang *immoral* atau *amoral*, yakni perbuatan yang tidak mengandung atau melanggar moral. (Bertens, 2002 : 7)

Pemikiran Islam tentang etika dan moral dikenal istilah akhlak (*al-akhlak*). Kata akhlak secara etimologi, dalam al-Quran tidak diketemukan, kecuali bentuk tunggalnya yaitu *khuluq* diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Dalam analisis semantik Sheila McDonough, dikatakan *khuluq* memiliki akar kata yang sama *khalaqa* yang artinya menciptakan (*to create*) dan membentuk (*to shape*) atau memberi bentuk (*to give form*). Kata yang akar katanya sama dengan itu pula adalah *Al-Khaliq* (Maha Pencipta) dan *makhluk* (makhluk, ciptaan). (Tafsir dkk. 2002: 14) (Asmaraman, 1992: 1) Dengan demikian sebenarnya istilah akhlak lebih dekat dengan pengertian moral,

karena akhlak sendiri dipandang sebagai sesuatu yang aplikatif. Sedangkan ilmu yang mempelajari atau membahas tentang baik dan buruk perilaku atau perbuatan disebut dengan *falsafah akhlakiah* atau *ilmu akhlak*, (Syukur, 2004: 3) yakni ilmu tentang keutamaan-keutamaan dan bagaimana cara mendapatkannya agar manusia berhias dengannya, dan ilmu tentang hal-hal yang hina dan cara manusia terbebas daripadanya.

Senada dengan itu, Ahmad Amin (1991: 3) membedakan akhlak dalam dua aspek *empiris* dan *filosofis*. Secara empiris, akhlak adalah perilakunya, sedangkan dalam aspek filosofis dipergunakan istilah ilmu akhlak, yaitu ilmu yang menerangkan tentang pengertian baik dan buruk, menjelaskan apa yang harus dilakukan manusia dalam hubungannya dengan sesamanya, menjelaskan tujuan yang seharusnya dituju oleh manusia dan menunjukkan jalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya diperbuat. Dengan demikian, akhlak memiliki pengertian yang lebih khas dibandingkan dengan etika atau moral. Akhlak merujuk kondisi psikologis atau kejiwaan sehubungan dengan kebiasaan atau proses pembiasaan menuju terciptanya perbuatan atau tingkah laku.

Pengertian di atas menunjukkan, sebenarnya antara moral dan etika, antara akhlak dengan ilmu akhlak, tidak dapat dipisahkan dalam tuntutan praktisnya, meskipun secara keilmuan pembedaan ini menjadi perlu untuk memudahkan kajian ilmiahnya. Itu sebabnya kajian tentang perilaku dalam Islam istilah ilmu akhlak tidak begitu populer. Hal ini karena kecenderungan pandangan ilmuwan Islam, bahwa bahwa seluruh *ulum al-'Arab* tanpa kecuali mengisyaratkan unsur-unsur akhlak. (Syukur, 2004: 3) Akhlak sebagai etika Islam merujuk pada keyakinan etikal yang harus dipenuhi sekaligus pelaksanaan dari keyakinannya tersebut. Bahkan etika dalam kajian para filosof muslim menjadi bagian dari tema keimanan, yakni akhlak menjadi perwujudan dari keimanan itu. (Subhi, 2001: 30)

Sumber ajaran Islam yang paling pokok adalah berasal dari Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kehidupan manusia diyakini oleh umat Islam bertujuan untuk mengabdikan kepada Allah (QS. Adz-Dzariyyat: 56) dan sekaligus menjadi khalifah (*co-worker*) Allah (QS.

Al-Baqarah: 30) dalam menciptakan kerahmatan di muka bumi (QS. Al-Anbiya: 107). Oleh karena itu Allah membekali manusia dengan Akal sebagai perangkat untuk untuk memahami alam semesta ini, dan Al-Qur'an-As-Sunnah sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan ini, Al-Qur'an sebagai wahyu Allah yang disampaikan kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW. sehingga perilaku Nabi dipandang sebagai penafsiran Al-Qur'an paling faktual. Bahkan di banyak riwayat ditegaskan bahwa Nabi tidak bertindak/berperilaku melainkan karena tuntunan wahyu, dan akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Itu sebabnya dalam keilmuan Islam, termasuk etika Islam tidak melepaskan dasar pemikirannya dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW.

Sehingga etika Islam pun mengacu kepada kedua sumber ini untuk mendapatkan mendapatkan petunjuk dan model bagi landasan filsafati dari perilaku, dan standar perbuatan baik dan buruk (QS. Al-Baqarah : 1-2), (QS. Al-Ahzab : 21), "Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, tidaklah kamu akan sesat selama-lamanya, selama kamu masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunah rasul-Nya." (al-hadits). Posisi Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam pemikiran etika Islam atau akhlak memang menduduki sumber utama, tetapi etika Islam juga terbuka kepada sumber-sumber yang lain seperti rasio atau filsafat dan adat masyarakat. Hal ini karena ada beberapa aturan etika yang termasuk dalam wilayah rasional seperti akhlak dalam kehidupan sosial dan sebagainya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Ghazali yang memandang: "orang-orang Turki, Kurdi, dan Badui yang primitif dan eksistensi mereka lebih tinggi daripada binatang, dengan akal nalurinya dapat mengetahui bahwa seseorang harus menghormati yang lebih tua, sebagai hasil dari pengalaman dan penggunaan akal mereka." (Syukur, 2002: 184)

Sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa akal mengetahui baik dan buruk sebagian besar perbuatan. Syari'at tidak membawa sesuatu yang sungguh-sungguh bertentangan dengan akal. Selain itu, *taklif* (adanya kewajiban) mensyaratkan adanya akal bagi manusia. Syariat dapat berubah karena akal menunjukkan bahwa taklif mengikuti kemaslahatan perbuatan tertentu. Perintah syari'at juga dapat dinasakh sepanjang pemberlakuannya mengandung kerusakan. (Shubhi, 2001:139)

Pembahasan etika Islam atau akhlak ini para etikawan Islam selalu membicarakan bertolak dari kondisi jiwa atau keadaan yang tertanam dalam jiwa. Menurut Ibn Miskawaih (932-1030), "*Khuluq* (akhlak) adalah keadaan jiwa yang mendorong (mengajak) untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikir dan dipertimbangkan lebih dahulu". (Miskawaih, 1994 : 56) Asmaran mengutip Ibrahim Anis seorang cendekiawan Mesir mengatakan "Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan." (Asmaran, 1992: 2)

Demikian juga yang diutarakan oleh Al-Ghazali (1058-1111), "*Khuluk* (akhlak) adalah sifat atau bentuk atau keadaan yang tertanam dalam jiwa, yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu dipikirkan dan dipertimbangkan lagi." Selanjutnya Al-Ghazali juga mengatakan bahwa, bila yang timbul darinya perbuatan mulia dan terpuji menurut syara' dan akal pikirannya yang sehat, dinamakan akhlak yang baik. Sebaliknya bila yang muncul adalah perbuatan yang jelek maka itu sumbernya dari akhlak yang jelek. (Ghazali, tt. : 52)

Tujuan setiap tindakan dalam pandangan etika adalah untuk mendapatkan kebaikan (*some good*) yang diidentifikasi sebagai kebahagiaan (*happiness*) yakni suatu kondisi ideal yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat, menentukan ukuran baik dan buruk sejauh yang diketahui dengan akal pikiran manusia. Oleh karena pandangan dalam Islam, seluruh kehidupan manusia ini diorientasikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka tujuan etika Islam adalah untuk mendapatkan keridlaan Allah. Keridlaan Allah ini menjadi kunci kebahagiaan yang dijanjikan Allah kepada umat manusia. (Syukur, 2004 : 5)

Tujuan akhlak menurut Ibn Miskawaih adalah untuk mencapai *al-Sa'adah*. Makna *al-Sa'adah* ini secara umum diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), tetapi sesungguhnya yang dimaksudkan Ibn Miskawaih adalah suatu konsepsi yang di dalamnya mengandung unsur kebahagiaan (*happiness*), kemakmuran (*prosperity*) keberhasilan (*success*), kesempurnaan (*perfection*), kesenangan (*blessedness*), kebagusan/kecantikan

(*beautitude*). (Suwito, 2004 : 116) (ibn Miskawaih, 1994 : 92) Dengan mengembalikan makna akhlak sebagai keadaan jiwa yang mendorong perbuatan secara spontan, maka spontanitas yang dituju adalah spontanitasnya perbuatan yang bersifat ketuhanan (*af'al ilahiyat*), yakni perbuatan yang semata-mata baik karena muncul dari inti kemanusiaan (*al-lubb*) yang hakikatnya adalah akal ketuhanan manusia itu sendiri (*'aqluhu al-ilahi*). (Suwito, 2004 : 118) (Ibn Miskawaih, 1994 : 98)

2. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Etika Media Massa

Dua kutub aliran besar filsafat moral yaitu Etika Deontologi (*deontological ethics*) dan Etika Teleologi (*teleological ethics*). (Vivian, 1991: 436-437) yang secara berbeda memberi penekanan pada basis etikanya yakni pada proses dan satunya lagi pada hasil. Bagi Aliran Deontology (Deontologi dari bahasa Yunani : *Deon* yang artinya kewajiban [*duty*]), masyarakat dipandang telah berlaku secara moral kalau masyarakat mengikuti aturan dengan baik. Sementara itu, Etika Teleologi (Teleologi dari bahasa Yunani: *teleos* yang berarti hasil (*result*) atau dampak (*consequence*) menekankan aspek etika ini pada hasil perbuatan.

Pada masa sekarang ini pandangan etika dengan pendekatan etika deontologi ataupun etika teleologi secara murni sudah banyak ditinggalkan orang. Para etikawan berusaha mengadakan sintesis kedua pendekatan etika ini guna mendapatkan rumusan etika yang dipandang paling sesuai dengan perkembangan dan kepentingan masyarakat umum. Beberapa prinsip etika berikut ini cukup memberi gambaran bagaimana media massa seharusnya menentukan sikapnya daalam aktivitas jurnalistiknya. (Straubhaar, 2000: 476)

1. Konsep *The Golden Mean* dari Aristotels (Seorang filosof terkenal dari Yunani kuno yang hidup 2.400 tahun lalu yang pikiran-pikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan filsafat hingga saat ini) menunjuk *moral virtue is appropriate location between two extremis*. Titik kunci dari ide etika ini adalah kebaikan moral yang berada di antara dua ekstrim, menghindari sikap ekstrim menuju moderasi dan seimbang (*moderation and balance*). Dalam jurnalisme modern, prinsip

- ini ditemukan dalam konsep *balance and fairness* (seimbang dan kejujuran). (Vivian, 1991 : 433)
2. Imperatif kategori (*categorical imperative*) dari Immanuel Kant (Filosof asal Jerman 1724 - 1804) yang dinyatakan sebagai *act on the maxim that you would want to become universal law*. Semua orang seharusnya bertindak sesuai dengan aturan yang dipahami merupakan diyakini sebagai hukum universal. Imperatif kategoris ini tidak menyuruh untuk jujur atau menghindari bohong karena pertimbangan tertentu, tetapi karena jujur itu sudah dari "sono"nya baik dan bohong itu sendiri memang suatu yang salah. (Abdullah, 2002 : 91) Media massa sudah semestinya memahami kaidah-kaidah yang berlaku secara universal ini sehingga tidak melakukan pelanggaran terhadap masyarakat.
 3. Etika situasi (*Situation Ethics*) yang sebenarnya bentuk sanggahan terhadap imperatif kategoris Kant. Dalam pandangan etika ini, norma moral tidak berlaku universal melainkan relatif karena setiap situasi memiliki keadaan yang berbeda. (Bertens, 2002 : 162) Semangat dari etika ini adalah media massa dan para jurnalis tidak boleh melanggar hukum yang berlaku dan melakukan praktek yang membahayakan kepentingan masyarakat, tetapi ia harus menghormati pandangan-pandangan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
 4. Etika Utilitarian (*utilitarian ethics*) dari Jeremy Bentham (Filosof dari Inggris 1748 - 1823) yang dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart Mill (Filosof dari Inggris 1806 - 1873) yakni konsep *the greatest happiness of the greatest number*, kebahagiaan yang paling besar dari jumlah yang paling banyak. Inti gagasan ini sebenarnya adalah ada perbedaan kualitatif instrinsik pelbagai macam kesenangan, bahwa beberapa jenis kesenangan lebih bernilai dan diinginkan dibanding kesenangan yang lain tanpa harus bertentangan dengan prinsip manfaat. (Mill, 2005 : XV) Dalam konteks media massa prinsip ini diterapkan dalam konsep jurnalisisme *the people's right to know*, hak masyarakat untuk tahu, dan hak mendapatkan informasi.
 5. Etika Tanggung-jawab Sosial (*Social Responsibility Ethics*) yang konsep ini dimunculkan dalam Komisi Hutchins (dipimpin oleh Robert M. Hutchins) suatu komisi yang diben-

tuk oleh masyarakat profesional jurnalis di Amerika Serikat tahun 1947. Komisi Hutchin ini merekomendasikan media massa dan para jurnalis untuk melakukan aktivitasnya sebagai bagian dari pelayanan terhadap tanggungjawab sosialnya. (Rivers, 2003 : 104; Vivian, 1991 : 436)

Hal inilah yang mendorong munculnya forum wartawan dan masyarakat –dalam *committee of Concerned Journalists*– merumuskan prinsip-prinsip jurnalisme agar aktivitasnya tetap pada koridor tujuan utama jurnalisme dalam menyediakan informasi yang diperlukan orang agar bebas dan bisa mengatur diri sendiri. Prinsip-prinsip yang disusun oleh Kovach (2006: 6) tersebut antara lain:

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran;
2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat;
3. Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi;
4. Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita;
5. Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan;
6. Jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat;
7. Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan;
8. Jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional;
9. Praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka.

Prinsip-prinsip jurnalisme tersebut memungkinkan para jurnalis bergerak dalam koridor ideal untuk mewujudkan tujuan mereka mendukung masyarakat berkembang ke arah kemajuan, dan demokratis. Orientasi sekaligus basis bagi visi jurnalisme adalah masyarakat itu sendiri, bukan pada sekelompok orang atau golongan tertentu. Prinsip jurnalisme ini mestinya menjadi pegangan bagi media massa dalam melaksanakan aktivitasnya menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

3. Prinsip Etika Islam pada Pemberitaan Politik

Media massa menjadi salah satu sumber yang memberi informasi tentang realitas politik melalui pemberitaan politik.

Media massa dalam masyarakat dihadirkan oleh masyarakat sendiri untuk saling berbagi informasi, mengartikulasikan ide-ide, dan bahkan mencerminkan keadaan diri mereka sendiri termasuk dalam bidang politik. Setiap orang memiliki orientasi dan opini sendiri-sendiri mengenai suatu keadaan politik, dan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk aktualisasi diri, maka masing-masing orang berkepentingan mengaktualisasikan ide dan keyakinan politiknya sekaligus berkepentingan terhadap informasi mengenai sikap politik orang lain.

Realitas politik yang sebenarnya kemudian ditangkap oleh media massa dan dipublikasikan sehingga terbentuklah realitas media. Hal ini karena media massa dalam pemberitaan politiknya memiliki cara pandang (*framing*) tertentu sesuai dengan ideologi media (Eriyanto, 2002). Pada akhirnya media massa menjadi wadah pertarungan wacana politik melalui pemberitaan politiknya. Pemberitaan politik dipenuhi dengan tarikan-tarikan kepentingan dari berbagai pihak. Pemberitaan-pemberitaan dalam media massa sangat diperhitungkan dalam proses politik oleh pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa politik seperti pemilihan umum atau pemilihan presiden. Namun demikian, media massa juga dituntut harus bersikap tidak memihak, independen, obyektif dan berimbang. Kaidah-kaidah etika pemberitaan menjadi utama bagi media massa untuk menjalankan fungsi imperatifnya secara optimal, yakni untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh semua orang untuk menentukan sikap politiknya.

Etika pemberitaan politik dalam media massa dapat ditinjau dari sisi teksnya sendiri, yakni teks sebagai manifestasi perilaku media dapat ditafsirkan nilai-nilai yang dianutnya. Perilaku media sangat ditentukan oleh sebuah proses produksi pemberitaan itu sendiri yang terjadi dalam ruang redaksi (*newsroom*). Bagaimana perilaku media ini bekerja (*discourse practice*) juga merupakan suatu sikap yang dapat ditinjau sisi etikanya. Oleh karena media massa ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosial politik (*sociocultural practice*), maka tinjauan etika terhadap pemberitaan politik di media massa juga harus melingkupi sosiokultural masyarakat (Eriyanto, 2003).

a. Teks Pemberitaan Representasi Kebenaran

Prinsip etika pemberitaan dalam level teks adalah bahwa teks pemberitaan haruslah merupakan representasi dari kebenaran. Kebenaran dalam pemberitaan tersebut akan memberi ketenangan bagi masyarakat untuk memilih alternatif sikap politik yang dipandang paling akurat, tepat dan baik. Ahmad Amin berpendapat “benar” adalah mengabari lainnya menurut apa yang ia yakini akan kebenarannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Di antara dusta adalah pembicara menghapus sebagian kenyataan dan menyebut perkataan lainnya, apabila menurut kata yang dihapuskan akan menjadikan apa yang disebut memiliki arti lain. Menyampaikan kebenaran berarti berkata benar dengan sebenar-benarnya, tiada sesuatu melainkan benar. (Amin, 1991: 214) Itilah lain adalah kejujuran, yang menurut Al-Syahrastani adalah mewartakan tentang sesuatu hal sesuai dengan faktanya, sementara dusta adalah mengabarkan tentang suatu hal yang berbeda dengan faktanya. (Shubhi, 2001: 129)

Kebenaran inilah yang dituntut oleh umat manusia, menjadi visi kehidupan yang ideal, dan hasrat terbesar dalam pencarian kehidupan. Sedemikian besarnya, karena kebenaran identik dengan nilai azali ketuhanan, Tuhan yang Mahabener. Sebagaimana para sufi memanggil Tuhan dengan sebutan *al-Haqq*, Sang Kebenaran (K besar). Kalimat ekstatik yang paling terkenal dalam khazanah tasawuf adalah ungkapan “ana al-Haqq (akulah Yang Maha Benar)” dari Husain ibn Mansur al-Hallaj (858 - 922M) dari Persia yang menyebabkan ia dihukum mati dengan tubuhnya dipotong-potong lalu dibakar dan debunya dibuang ke sungai Tigris. (Nasution, 1995 : 87) Al-Quran juga menegaskan keharusan untuk menyampaikan kebenaran, sebagaimana dalam al-Quran surat al-Ahzab ayat 70-71 :

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan sampaikanlah perkataan yang benar. Allah akan memperbaiki bagi amalan-amalanmu dan mengampuni bagi dosa-dosamu. Dan barangsiapa yang mematuhi Allah dan Rasul-Nya maka ia akan memperoleh sukses yang besar.” (QS. Al-Ahzab : 70-71)

Kewajiban jurnalisisme yang pertama adalah pada kebenaran, demikian Kovach (2006: 38) merumuskan elemen pertama dari sembilan elemen jurnalisisme. Indriyanti mengutip

Jalaluddin Rakhmat, mengungkapkan bahwa konsep kebenaran dan kejujuran ini dengan sangat baik dioperasikan dalam kode etik *Sigma Delta Chi, the Society of Professional Journalism*, yang menyatakan: *the duty of journalist is to serve the truth*. (Indriyanti, 2006: 79) Kebenaran menjadi tanggungjawab paling dasar bagi praktek jurnalisme. Untuk memenuhi kewajiban fundamental itu, media massa harus bertindak dalam koridor kejujuran dan keadilan. Berita dituntut untuk memiliki kehandalan dan kualitas tertentu sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempelajari dan berfikir tentang realitas yang melingkupi sehingga mereka dapat menentukan pendirian yang tepat dalam suatu situasi tertentu.

Teks pemberitaan politik dalam media massa dituntut untuk mencapai derajat kebenaran faktualitas dengan melakukan upaya *check-recheck*, konfirmasi, dan akurasi (McQuail, 1992: 96-210). Hal ini untuk menghindari terjadinya *defamation* (pencemaran nama baik), baik berupa *libel* (hasutan) maupun *slander* (fitnah). (Potter, 2006: 60) Tuntutan ini senada dengan keharusan tabayyun dalam tradisi Islam yang ditegaskan oleh al-Quran :

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita maka periksalah dengan teliti (*fa tabayyanu*), agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu.” (QS. Al-Hujurat: 6)

Media massa untuk menampilkan kebenaran dalam teks pemberitaan, hanya dengan menuntutnya menyajikan fakta yang benar. Bagi pemberitaan, kebenaran yang obyektif adalah visi yang terus menerus diupayakan dalam bentuk akurasi dan kejujuran terhadap kebenaran itu sendiri. Setiap media massa sah-sah saja memiliki target-target tertentu yang harus dicapai, tetapi proses pencapaian itu tidak boleh keluar dari Prinsip Kebenaran. Tanpa berpegang dengan prinsip kebenaran itu, maka target-target yang baik tidak akan menjadi baik, bahkan akan menjadi rusak nilainya tanpa kebenaran. Karena inti dari informasi pemberitaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah kebenaran itu sendiri.

Dengan berdasarkan pada prinsip kebenaran ini maka

pemberitaan politik yang dilakukan oleh media massa tidak melakukan *negative campaign* berkategori *black propaganda* / *black campaign* karena kampanye dalam bentuk itu biasanya berisi fitnah, dusta dan bohong untuk menjatuhkan satu atau beberapa pihak lain. Oleh karena sikap berpihak semacam itu akan dapat menimbulkan bias dalam pemberitaan yang akhirnya akan mengurangi nilai faktualitas berita dan menjadi intervensi yang besar terhadap fakta. Namun media massa dapat menuliskan pemberitaan *negative campaign* dalam rangka kritisisme terhadap *track record*, kekuatan dan kelemahan para kontestan. Hal ini justru akan membantu khalayak dalam melakukan *judgement* yang benar, sehingga masyarakat tidak memilih kucing dalam karung, melainkan memilih calon legislatif ataupun calon presiden yang tepat, yakni sesuai informasi yang valid, jelas, akurat dan apa adanya untuk diterima dan diinterpretasikan secara mandiri oleh masyarakat.

b. Hati Nurani sebagai *Imperative Categories* dalam *Discourse Practice*

Prinsip etika pemberitaan pada level *discourse practice* ditujukan pada para pelaku media massa. Penilaian terhadap media sebenarnya adalah penilaian terhadap orang-orang yang menjadi pelaku media. Media massa hanyalah peralatan yang dipergunakan oleh para pelakunya untuk bertindak dan bersikap. Sikap media dan perilaku media hakikatnya adalah hasil dari kompromi para pelakunya, apakah ia akan menjadi baik atau menjadi buruk tergantung dari apa yang pelaku media lakukan terhadap media massa tersebut. *The man behind the media*. Para pelaku inilah yang menjadi “jiwa penggerak” bagi media, dan di dalam diri para pelaku ada jiwa yang sesungguhnya, jiwa yang menggerakkan jiwa pengerak. Teks pemeritaan hanya “jejak” dari keyakinan, ideologi dan perilaku pada pelakunya. Sebagaimana diungkapkan oleh David Hume (Izetbegovic, 1992: 129)

Sebuah tindakan tidak memiliki moral dalam dirinya sendiri; untuk mempelajari nilai moral manusia kita harus melihat ke dalam. Dengan demikian para pelaku media massa di dalam ruang redaksi (wartawan, redaktur, editor, dan pemilik media) semestinya menjadi “jiwa” yang sehat, baik dan

luhur bagi perkembangan medianya, sehingga wacana yang diproduksi melalui pemberitaan-pemberitaan di media massa ini dapat mewujudkan pemberitaan yang bernilai etika. Tarik ulur kepentingan dan situasi sosial politik bahkan ekonomi yang melingkupi proses produksi pemberitaan harus mendapatkan pertimbangan dari hati nurani, sehingga keputusan untuk beropini, berinterpretasi, bahkan berpihak pada situasi tertentu bukan diputuskan dengan pertimbangan kepentingan ekonomi atau politis sesaat, atau kecenderungan naluri rendah, melainkan didasarkan pada pertimbangan etika, tanggungjawab dan keadilan dan kebenaran sehingga melahirkan media massa yang berkarakter, berkepribadian dan bermoral.

Sebagaimana halnya jiwa manusia, "jiwa" media ini juga harus dilatih agar peka terhadap tuntutan-tuntutan etikanya. Oleh karena itu itu pelaku media harus membentuk sikap diri yang profesional dan idealistik. Profesional dalam pengertian menguasai *skill* jurnalistik dan kaidah-kaidah jurnalisme; sekaligus idealistik yakni memiliki idealisasi-idealisisasi tentang kehidupannya dan masyarakat dalam bingkai kebenaran dan keadilan. Bingkai kebenaran sebagaimana diungkapkan di depan dalam konteks jurnalistik adalah Konsep kebenaran-kejujuran ini dalam perspektif media massa meliputi *fairness, truth, accuracy*, konfirmasi dan *check and recheck* (Kovach (2006: 38).

Konsep adil dalam konteks pemberitaan ditunjukkan dengan istilah-istilah seperti *relevance* (relevansi), *balance* dan *cover both side* (seimbang), *neutral* dan *Impartiality* (netral dan tidak memihak), dan *proportional* (proporsional) (lihat McQuail, 1992: 96-210). Pemberitaan di media massa harus memiliki relevansi dengan kepentingan masyarakat baik untuk individu-individu dan terutama untuk kepentingan umum. Media massa hadir dalam masyarakat, oleh karena itu tidak boleh tercabut dari akar masyarakatnya. Termasuk di dalamnya menimbang apakah pemberitaannya melanggar hak privasi atau benar-benar signifikan bagi masyarakat. Adil dalam konteks relevansi ini adalah menilai seleksi kualitas berita (*news selection*), (Rahayu, 2006: 19) yakni kegiatan mengukur, menyeleksi dan mengelola materi pemberitaan agar sesuai dengan situasi, kepentingan dan tujuan masyarakat.

Suara hati nurani tersebut dapat mewujudkan menjadi tindakan membutuhkan prasyarat yaitu kebebasan. Pada era dewasa ini, media massa telah mendapatkan kebebasannya setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang “cenderung otoriter”. Para etikawan muslim mengerucut pada pendapat tentang adanya kebebasan bagi manusia. Hal ini karena disadari bahwa etika merupakan implikasi langsung dari adanya kebebasan. Seseorang dinilai berbuat baik atau buruk hanya jika ia mempunyai kebebasan untuk memilih tindakan tersebut. Seseorang yang berada dalam tekanan, pemaksaan dan ketidakbebasan tidak dapat dikenai penilaian baik atau buruk.

Kebebasan sebagai prinsip guna dimungkinkannya implementasi kewajiban dan realisasi *reward* dan *punishment*. Jika sejumlah beban diwajibkan bagi manusia maka kebebasan merupakan atribut kehendak guna dimungkinkannya penerapan *taklif* sebagaimana diwajibkan. (Shubhi, 2001 : 163) Menurut Kant dalam *Fundamental Principles of The Metaphysical of Morals*, dalam wilayah empirik, manusia tidak bebas arena seluruh indera tunduk mutlak pada dunia luar, dan pengetahuan manusia patuh terhadap obyek-obyek luar. Namun dalam wilayah non-empirik (*thing in self*) manusia adalah makhluk bebas. Karenanya independensi kehendak menjadi suatu keharusan, karena hal itu berakibat pada lebih dimungkinkannya penegakan etika. (Shubhi, 2001: 163)

Dalam Al-Qur'an juga banyak memuat ayat-ayat yang secara eksplisit menunjukkan adanya peluang kebebasan bagi manusia untuk melakukan perbuatannya, seperti:

“Allah tidak sekali-kali akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Al-Anfal : 53)

Kebebasan membawa konsekuensi bagi manusia berupa tanggungjawab yakni tanggungjawab bagi dirinya sendiri dan tanggungjawab terhadap Tuhan. Selain ayat-ayat di atas, al-Qur'an juga menyinggung secara karikatif keberadaan surga sebagai imbalan bagi orang-orang yang baik, dan neraka sebagai hukuman bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Pandangan teologis di atas memiliki implikasi besar dalam orientasi etika. Bahwa setiap orang memiliki hak dasar berupa kebebasan untuk

melakukan tindakan yang dikehendakinya, tetapi sekaligus mendapatkan beban tanggung-jawab sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Tanggung-jawab (*responsibility*) ini oleh Abdullah Salam diartikan sebagai: *Having the character of a free moral agent; capable of determining ones's own acts; capable of deterred by consideration of sancion or consequences*. Tanggung-jawab menunjukkan adanya kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan, dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan. (Salam, 1997: 28)

Jika dalam pandangan etika Islam - bagi manusia - tolakan sikap moral atau akhlak dibangun dari kondisi jiwa (*khuluq*), maka jiwa bagi media adalah para pelaku pemberitaan media itu sendiri, yakni wartawan, editor, dan redaktur sebagai *gatekeeper* atau penjaga gawang, istilah yang umum dipakai dalam kajian komunikasi untuk menggambarkan fungsi agen yang memfasilitasi proses informasi dalam masyarakat. *Gatekeeper* ini memberikan akses lalu lintas data dan informasi dari penyampai pesan ke penerima pesan dalam suatu bidang tanggapan indrawi segera (*immediate sensory field*). (Manca, 1998: 48) Serta tentu saja pemilik media (*media owner*). Media massa hanyalah refleksi sikap dan pandangan dari orang-orang yang terlibat dalam proses pemberitaan. Maka etika pemberitaan sangat tergantung pula pada orientasi moral para pelakunya dalam mengolah pemberitaan dalam *newsroom* (dapur redaksi). Dalam pandangan kritis, para *gatekeeper* yang berada di dapur redaksi tidak bisa dipisahkan dari nilai dan ideologi yang diyakini atau dianut, (Eriyanto, 2003 : 33) terlebih nilai dan ideologi media yang dibangun melalui penetapan visi media. Media massa yang digerakkan oleh para *gatekeeper* di era kebebasan pers sekarang ini tentu dapat memilih tindakan-tindakan mana yang dipandang merupakan suatu keutamaan yang dapat mewujudkan tercapainya kebahagiaan masyarakat luas, dalam bentuk demokrasi, kesejahteraan, dan pencerdasan kehidupan masyarakat melalui pemberitaan yang akurat, tepat, berimbang, adil dan sesuai norma masyarakat.

c. Visi Etika Pemberitaan adalah Masyarakat Adil dan Demokratis

Etika pada umumnya bertujuan untuk mencapai

kebahagiaan (*al-sa'adah, happiness, sumum bonum*) dengan melalui jalan kebaikan dan keutamaan (*virtue, al-fadhilah*) yang mencita-idealkan suatu konsepsi yang di dalamnya mengandung unsur kebahagiaan (*happiness*), kemakmuran (*prosperity*) keberhasilan (*success*), kesempurnaan (*perfection*), kesenangan (*blessedness*), kebagusan/kecantikan (*beautitude*). (Suwito, 2004: 116) (ibn Miskawaih, 1994: 92). Apa yang dilakukan oleh media massa dalam menerbitkan pemberitaan-pemberitaan politik dalam koridor etika ini tidak lain juga untuk mencapai kebaikan bagi khalayak. Pemberitaan politik sangat penting dalam konteks masyarakat, karena dimensi politik berhubungan erat dengan masyarakat secara keseluruhan. Kehidupan bermasyarakat – secara luasnya berbangsa dan bernegara – membentuk sistem kewenangan yang mengatur hubungan-hubungan antaranggota di dalamnya.

Di sinilah fungsi pemberitaan politik untuk menyampaikan informasi-informasi tentang situasi masyarakat, citra personal dan struktur politik mendapat posisi yang sangat penting. Tidak sekedar memberi informasi, posisi pemberitaan politik lebih khusus lagi sangat berperan dalam memberi preferensi bagi masyarakat untuk berpendapat terkait diri mereka dalam bentuk opini publik atau pendapat umum, sehingga memperteguh dan menguatkan predisposisi keyakinan atau sikap politik masyarakat.

Kewajiban terhadap kebenaran dan loyalitas kepada masyarakat, forum kritik dan dukungan hakikatnya menyertakan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* Kalimat lengkapnya sebenarnya adalah *al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar*, secara etimologi berarti memerintahkan *al-ma'ruf* dan melarang *al-munkar* (Syukur, 2004: 215). Secara harfiah kata *ma'ruf* berasal dari asal kata *'urf* yang berarti “yang dikenal” atau “yang dapat dimengerti, dipahami dan dapat diterima oleh masyarakat”. Sedangkan antonim dari *ma'ruf* adalah *munkar* yang berarti “yang dibenci, yang tidak disenangi, yang ditolak oleh masyarakat karena tidak pantas dan tidak patut dikerjakan oleh manusia yang berakal”. (Izutsu, 1993 : 257)

Perintah *amar ma'ruf nahi munkar* ini dalam al-Qur'an surat Ali Imron: 104 dan 110 disebut menunjuk hubungan *ma'ruf* dan *munkar* dengan kata *ummat* atau masyarakat. Hal

ini karena pengertian *ma'ruf* dan *munkar* dalam banyak konteks selain menunjukkan sikap yang berhubungan dengan Tuhan, juga menunjuk relasi kemanusiaan (antar manusia, antar kelompok, individu dengan kelompok) dan perilaku sosial, sehingga perbuatan *ma'ruf* dan *munkar* dari anggotanya sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat. Bahkan Muhammad Abduh mengatakan *fa al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar huffadz al-jama'ah wa siyaj al-wahdah* (*amar ma'ruf dan nahi munkar* adalah benteng pemeliharaan umat dan pangkal timbulnya persatuan) (Rakhmat, 1996 : 177).

Kewajiban perintah ini terwujud dalam kritik konstruktif untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Setiap gejala penyimpangan dalam masyarakat, dalam proses sosial maupun proses politik, media massa harus melakukan kritik, membangun kritisisme dalam masyarakat melalui pemberitaannya, sehingga terbentuk opini publik yang turut mengkritisi fenomena tersebut. Sementara terhadap gejala sosial dan politik yang semakin mengarahkan masyarakat kepada keadilan, kesejahteraan dan kebaikan bersama, pemberitaan itu dilakukan dalam rangka menggalang dukungan terhadap gejala tersebut sehingga dapat terdorong menjadi gejala umum bahkan gerakan bersama untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera.

Dalam konteks pemberitaan media massa, *amar ma'ruf nahi munkar* ini diterapkan melalui fungsi kontrol sosial. Media massa menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengontrol kekuasaan/pemerintah sekaligus mengontrol sendiri, sehingga terjadi dinamika dalam masyarakat. Masyarakat memiliki norma dan nilai yang dianut, baik dari pemikiran filosofis masyarakat maupun dari nilai-nilai agama yang mendasari perilaku sosial masyarakat dalam mencapai tujuan bersama seperti mewujudkan masyarakat demokratis, sejahtera dan berkeadilan. Media massa berperan dalam mengontrol perilaku masyarakat dan kekuasaan agar selaras dengan nilai-nilai tersebut sekaligus membantu mengkonstruksi cara mewujudkan tujuannya.

Kritik yang disampaikan juga kritik yang konstruktif bagi perbaikan perilaku, sikap dan tujuan masyarakat. Suatu kritik selalu menginginkan adanya perbaikan, ini berarti kritik memiliki orientasi ke masa depan dan berhubungan dengan perlunya suatu situasi ideal dan perilaku ideal (*ideal conduct*)

dalam masyarakat. Apabila kritik sosial ditujukan kepada suatu elit, maka biasanya yang dipermasalahkan adalah ada-tidaknya *high standards of performance* atau pelaksanaan fungsi dan tugasnya berdasarkan *ethos* dan moralitas yang tinggi yang diharapkan oleh masyarakat. (Susanto, 1977 : 5) Hal demikian juga berlaku dalam kritik sosial terhadap masyarakat pada umumnya, yaitu terwujud-tidaknya situasi ideal di masyarakat berdasar *ethos* dan moralitas yang secara bersama dan berdasarkan pengetahuan masyarakat itu sendiri.

III. Penutup

Pemberitaan politik di media massa memiliki peran yang cukup penting bagi proses demokratisasi. Tidak dipungkiri bahwa media massa merupakan pilar penting bagi demokrasi, karena dengan media massa ini partisipasi politik masyarakat dapat didorong secara optimal. Fungsi normatif pers untuk memberi informasi dan pendidikan politik sekaligus kontrol politik bagi masyarakat dan pelaku politik menuntut media massa melakukan aktivitasnya disertai dengan rasa tanggungjawab dan penuh dengan sikap etika.

Etika media massa pada level teks, menunjukkan keharusan media massa menjadi representasi kebenaran. Hal ini ditunjukkan dengan pemberitaan yang berbasas faktualitas dengan melakukan upaya *check-recheck*, konfirmasi, dan akurasi. Sementara etika pada level *discourse practice* berada pada etika para pelaku media massa. Pelaku media massa merupakan "ruh" dari pemberitaan, karena itu media massa menjadi baik atau buruk tergantung kualitas pelaku media. Etika jurnalistik sebagai moralitas harus dipegangi oleh para pelaku media massa sebagai *imperative categories*. Pelaku media massa dituntut tanggungjawab dan etika profesi dalam menjalankan tugasnya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Adapun etika pada level *sociocultural practice* berada para visi media massa yang harus berorientasi pada terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Bandung : Mizan, 2002
- Amin, Ahmad, *Kitab al-Akhlaq* terj. Farid Ma'ruf, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Amir, Mafri, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Rajawali Press, 1992
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992
- Bertens, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Dharma, S. Satya, dkk., *Malpraktek Pers Indonesia, dari Somasi B.J. Habibie ke Tuntutan Tomy Winata*, Jakarta: Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia, 2003
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta: LKiS, 2002
- Ghazali, Abu Hamid Al-, *Ihya' Ulumuddin III*, Cairo Mesir: Masyad al-Husaini, tt.
- Hamad, Ibnu, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-berita Politik*, Jakarta: Granit, 2004.
- Indriyanti, Amelia, *Belajar Jurnalistik dari Nilai-nilai Al-Qur'an*, Solo: Samudera, 2006

Etika Islam tentang Pemberitaan Politik di Indonesia

- Izetbegovic, 'Alija 'Ali, *Islam between East and West*, terj. Nurul Agustina dkk., *Membangun Jalan Tengah: Islam Antara Timur dan Barat*, Bandung : Mizan, 1992
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel, *The Elements of Journalism*, Terj. Yusi A. Pareanom, *Sembilan Elemen Jurnalisme*, Jakarta: Yayasan Pantau, 2006
- Manca, Luigi, "Jurnalisme, Advokasi, dan Model Komunikasi untuk Demokrasi", Jakarta: *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, no.1/Juli/1998
- McQuail, Denis, *Media Performance: Mass Communication and the Publik Interest*, New Dehli : Sage Publications, 1992
- Mill, John Stuart, *On Liberty*, Terj. Alex Lanur, *On Liberty: Perihal Kebebasan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2005
- Miskawaih, Ibn, *Tahdzib al-Akhlaq*, Terj. Helmi Hidayat, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, Bandung: Mizan, 1994
- Muhtadi, Asep Saefullah, *Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Logos, 1999
- Musyafak, Najahan, "Pers Freedom in Indonesia an Examination of 'Pers Pancasila' Between 1993-1998", Tesis, University of South Australia, 2001
- Nasution, Harun, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Potter, Deborah, *Buku Pegangan Jurnalisme Independen*, Jakarta: Biro Program Informasi Internasional Deplu AS, 2006
- Rahayu (ed), *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*, Jakarta: Pusat Kajian Media & Budaya Populer, Dewan Pers, dan Depkominfo, 2006

Joko Tri Haryanto

Rakhmat, Jalaluddin, dkk., *Kuliah-kuliah Tasawuf*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000

Rivers, William L., Jay W. Jensen, dan Theodore Peterson, *Mass Media and Modern Society (2nd Edition)*, Terj. Haris Munandar dan Dudy Priatna, *Media Massa dan Masyarakat Modern* (edisi kedua), Jakarta: Kencana, 2003

Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997

Straubhaar, Joseph, dan Robert LaRose, *Media Now: Communications Media in The Information Age*, Belmont USA: Wadsworth/Thomson Learning, 2000

Subhi, Ahmad Mahmud, *Al-Falsafah al-Akhlaqiyyah fi al-Fikr al-Islami: al-'Aqliyyun wa al-Dzauqiyyun aw al-Nadzar wa al-'Amal*, terj. Yunan Askaruzzaman Ahmad, *Filsafat Etika: Tanggapan Rasionalis dan Intuisi Islam*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001

Susanto, "Makna dan Fungsi Kritik Sosial dalam Masyarakat dan Negara", Jakarta : *Jurnal Prisma LP3ES*, no.10 Oktober 1977.

Suseno, Suseno, Frans Magnis, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1993

Suwito, *Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih*, Yogyakarta: Belukar, 2004.

Syukur, Suparman, *Etika Religius*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Tafsir, Zaenul Arifin, Komarudin, *Moralitas Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, Yogyakarta: Gama Media, 2002

Vivian, John. *The Media of Communication*, Winova State University USA, 1991.